

**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT (4)
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TERHADAP PENETAPAN PENERBITAN
AKTA KEMATIAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Religius Sarumaha
160710016**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT (4)
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TERHADAP PENETAPAN PENERBITAN
AKTA KEMATIAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Religius Sarumaha
160710016**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Religius Sarumaha
NPM : 160710016
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT (4) UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2013 TERHADAP PENETAPAN PENERBITAN
AKTA KEMATIAN DI KOTA BATAM**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah akademik ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah akademik ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah akademik ini digugurkan dan dicabut yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 11 Maret 2020

Materai 6000

Religius Sarumaha
160710016

**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT (4)
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TERHADAP PENETAPAN PENERBITAN
AKTA KEMATIAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Religius Sarumaha
160710016**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti yang tertera dibawah ini**

Batam, 11 Maret 2020

**Agus Riyanto, S.H., M.Kn
Pembimbing**

ABSTRAK

Akta Kematian merupakan akta catatan sipil yang diterbitkan kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di wilayah Kabupaten/Kota, dalam administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada setiap warga negara sehingga perlu pengelolaan informasi kependudukan secara terkoordinasi. Penulisan skripsi ini, dengan analisis pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tujuannya dari penelitian ini adalah menganalisis kewenangan pengadilan terkait penetapan penerbitan akta kematian, serta mengetahui serta memahami bagaimana analisis Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dengan bahan hukum sekunder undang-undang, buku dan jurnal. Hasil penelitian dan pembahasan adalah meninggalnya seseorang yang sudah lama terjadi tetapi tidak dilaporkan, oleh pihak keluarga dalam mengurus akta kematian melalui proses permohonan pengadilan negeri setempat. Selanjutnya pihak keluarga yang telah mendapatkan penetapan penerbitan akta kematian keluarganya memohonkan penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan dalam akta catatan sipil dan diterbitkan akta kematian. Adanya akta kematian, maka keluarga si meninggal dapat menggunakan akta tersebut dalam berbagai hal seperti status identitas diri/KTP, pembagian harta waris, serta kegunaan lain yang diperlukan. Kesimpulannya bahwa akta kematian digunakan sebagai persyaratan pengurusan warisan, baik kepada isteri atau suami maupun anak-anak yang telah ditinggalkan. Kemudian digunakan sebagai syarat untuk menikah. Selain itu, juga untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya, dan kepengurusan perbankan. Data Penduduk yang dilaporkan kematiannya oleh keluarga si meninggal akan dihapuskan dari Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pernah dimiliki kemudian segera untuk dinonaktifkan disistem kependudukan agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

Kata Kunci: Akta Kematian; Masyarakat; Penetapan.

ABSTRACT

Death Certificate is a civil registration certificate issued by the Population and Civil Registry Office located in the Regency/City area, in population administration it has strategic values for government administrators, development and services to every citizen so that it needs to manage population information in a coordinated manner. Writing this thesis, with an analysis of the implementation of Article 44 paragraph (4) of Law Number 24 Year 2013 concerning Population Administration. The purpose is to analyze the authority of the court regarding the determination of the issuance of death certificates, and to know and understand how the analysis of Article 44 paragraph (4) of Law Number 24 of 2013 concerning the determination issuance of death certificate in Batam City. This type of research that researchers use is normative legal research with the method of collecting data using literature studies with secondary legal material laws, books and journals. The result of the research and discussion is the death of someone who has happened a long time ago but not reported, by the family in arranging the death certificate through the local district court application process. Furthermore, the family who has obtained the issuance of the death certificate for his family requests the issuance of the death certificate in the Population and Civil Registry Office to be recorded in the civil registry certificate and the death certificate is issued. The existence of a death certificate, then the family can die using the certificate in various ways such as the status of identity / KTP, the distribution of inheritance, and other necessary uses. The conclusion is that the death certificate is used as a condition for administering inheritance, either to the wife or husband or children who have been left behind. Then used as a condition for marriage. In addition, also to take care of pensions for heirs, and banking management. Population data reported by the deceased's family will be deleted from the Family Card and the Population Identification Number (NIK) once owned and then immediately to be deactivated in the population system so that it is not misused by irresponsible parties

Keywords: *Death Certificate; Community; Determination.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si, Rektor Universitas Putera Batam;
2. Rizky Try Anugrah Bhakti, S.H., M.H, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora sekaligus Ketua Penguji;
3. Padrisan Jamba, S.H., M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Agus Riyanto, S.H., M.Kn selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Irene Svinarky, S.H., M.Kn sebagai anggota penguji;
6. Lenny Husna, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
7. Drs. Ukas Ibrahim, S.H., M.Hum;
8. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H;
9. Zuhdi Arman, S.H., M.H;
10. Zulkifli, S.H., M.H;
11. Radius, S.H., M.H;
12. Dosen dan Staf Universitas Putera Batam;
13. Orang Tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan penuh kepada Penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Ilmu Hukum;
14. Saudara-saudara tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat serta bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini;
15. Rekan-rekan seperjuangan semua atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis; dan
16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufiknya Amin.

Batam, 11 Maret 2020

Religius Sarumaha

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Batasan Masalah.....	12
1.4. Rumusan Masalah	13
1.5. Tujuan Penulisan.....	13
1.6. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Kerangkak Teori.....	15
2.1.1. Teori Kewenangan.....	16
2.1.2. Teori Kepastian Hukum.....	18
2.1.3. Teori Keabsahan	21
2.2. Kerangka Yuridis	23
2.2.1. Kewenangan Pengadilan Negeri Batam	23
2.2.2. Akta Kematian	25
2.3. Penelitian Terdahulu	28
2.4. Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 2.1.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
3.2. Metode Pengumpulan Data	43
3.2.1. Jenis Data.....	43
3.2.2. Alat Pengumpulan Data	45
3.3. Metode Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48

4.1. Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Negeri Batam Terkait Penetapan Penerbitan Akta Kematian	48
4.2. Analisis Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap Penetapan Penerbitan Akta Kematian di Kota Batam.....	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	72
5.1. Simpulan	72
5.2. Saran.....	73
Daftar Pustaka	74
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Pendukung Penelitian	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	